



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD IMRON ROZULI
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG UMUM, KEUANGAN, DAN SUMBER DAYA
3. NHK : 868049

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.705.600.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 454.000.000
4. Tanah Seluas 1400 m2 di KAB / KOTA BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 223.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 634 m2/24 m2 di KAB / KOTA BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 58.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 170.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 88.000.000
2. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 52.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.200.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 91.200.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	32.500.000
Sub Total	Rp.	2.009.500.000
III. HUTANG	Rp.	321.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.688.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.